

Katalog: 9302020.15
ISSN 2301-4466

Produk Domestik Regional Bruto

Provinsi Jambi Menurut Pengeluaran

2020-2024

Volume 10, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Katalog: 9302020.15
ISSN 2301-4466

Produk Domestik Regional Bruto

Provinsi Jambi Menurut Pengeluaran
2020-2024

Volume 10, 2025

<https://jambi.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI
MENURUT PENGELUARAN 2020–2024
Volume 10, 2025**

Katalog : 9302020.15
ISSN : 2301-4466
Nomor Publikasi : 15000.25011

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x+80 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:
canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI
MENURUT PENGELUARAN 2020–2024
Volume 10, 2025

Pengarah
Agus Sudibyo

Penanggung Jawab
Sumarmi

Penyunting
Oelistina

Penulis Naskah
Zulfichar Anggara Adhi Mahendra

Pengolah Data
Zulfichar Anggara Adhi Mahendra

Pembuat Kover
Rieko Nopriady

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Jambi, April 2025
Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudiby, M.Stat.

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI
MENURUT PENGELUARAN 2020–2024
Volume 10, 2025

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	17
2.5 Perubahan Inventori	22
2.6 Ekspor Impor	25
BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jambi Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	42
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	43
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	47
3.7 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi	49
3.8 Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi Jambi	50
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antardaerah Provinsi Jambi	52
BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB	53
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal)	55
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	56
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	57
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	58
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	58
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	59
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	60
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Balance of Trade</i>)	62
4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	63
BAB 5 KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024	31
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024	32
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024.....	34
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024.....	35
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024.....	36
Tabel 3.6	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2020–2024.....	37
Tabel 3.7	Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi (persen), 2020–2024.....	39
Tabel 3.8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	40
Tabel 3.9	Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	41
Tabel 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2020–2024	42
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2020–2024.....	43
Tabel 3.12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2020–2024 (persen)	45
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024	46
Tabel 3.14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2020–2024.....	48
Tabel 3.15	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2020–2024	49
Tabel 3.16	Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2020–2024.....	51
Tabel 3.17	Perkembangan Net Ekspor Antardaerah Provinsi Jambi, 2020–2024.....	52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2020–2024.....	55
Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2020–2024	56
Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024.....	57
Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2020–2024.....	58
Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2020–2024	59
Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi, 2020–2024	60
Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi, 2020–2024	61
Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2020–2024.....	62
Tabel 4.9 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Jambi, 2020–2024.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

Apa itu PDRB?

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan PDRB

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

- A. Menurut Pendekatan Produksi
- B. Menurut Pendekatan Pendapatan
- C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1.1.1 Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalan,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

1.1.2 Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

1.1.3 Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya,
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun,
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah,
4. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/wilayah,
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi,
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri,
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk,
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Komponen Penyusun PDRB
Menurut Pengeluaran



**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
LNPRT**

**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
Rumah Tangga**



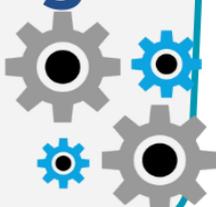
**Pembentukan
Modal Tetap
Bruto**



**Pengeluaran
Akhir Konsumsi
Pemerintah**



**Ekspor dan
Impor Barang
dan Jasa**



**Perubahan
Inventori**



BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

Komponen PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol,
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik,
3. Pakaian dan alas kaki,
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya,
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin,
6. Kesehatan,
7. Angkutan,
8. Komunikasi,
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan,
10. Pendidikan,

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel.
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok,
2. Pakaian dan Alas Kaki,
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga,
4. Kesehatan dan Pendidikan,
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya,
6. Hotel dan Restoran,
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*), nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer),
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri,
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain,
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang berkaitan dengan komponen PKRT, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut,
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga,

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah,
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Penghitungan PKRT Tahunan

1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2 Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas . Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai dari beberapa komoditas tertentu.

Hasil penghitungan tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas: Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun, Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
- b. Terhadap data poin kesatu dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu,
- c. Data poin kedua dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*,
- e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP,
- f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar.

2.2.2 Konsep dan Definisi

Sektor LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- Lembaga ini umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

Sektor LNPRRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Jenis LNPRRT dibedakan menjadi tujuh, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PKLNPRRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang, dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain,
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya,
- Penyusutan,
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2.2.4 Penghitungan PKLNPR T Tahunan

1 Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non profit (SKLNP); informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT; informasi yang diperoleh dari hasil pemutakhiran direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2 Metode Penghitungan

PKLNPR T diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Tahapan estimasi PKLNPR T adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (nilai barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku) dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{X_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

X_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

PKLNPR T ADHK 2010 diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPR T ADHB (yang diperoleh dari rumusan di atas) dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Pada sistem perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah,

- b. Memproduksi jasa, contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditas (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) provinsi mencakup : a. pengeluaran konsumsi pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b. pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi yang bersangkutan; c. pengeluaran konsumsi pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; d. pengeluaran konsumsi pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

1 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP provinsi tahunan adalah:

- Data realisasi APBN tahunan Kementerian Keuangan,
- Data realisasi APBD tahunan Kementerian Keuangan,
- Statistik Keuangan Daerah (BPS),
- Output Bank Indonesia (BI),
- Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

2 Metode Penghitungan

1. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah provinsi atas dasar harga berlaku, secara umum dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP atas dasar harga berlaku} = \text{output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PKP provinsi atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut, pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut, dan pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan,

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya, produk kekayaan intelektual, dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

1 Sumber Data

Sumber data untuk penghitungan PMTB Tahunan yaitu:

1. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota,
2. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat,
3. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat,
4. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
5. Laporan keuangan perusahaan,
6. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi,
7. Indeks Harga Perdagangan Besar dari Statistik Harga Perdagangan Besar,
8. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas),
9. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum,
10. Publikasi Statistik Konstruksi,
11. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
12. Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan.

2 Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang

menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ *arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian dimana sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih

harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Yang pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar,
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*trade and transport margin*) sulit diperoleh,
- Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Perekonomian juga memiliki aktivitas berupa inventori. Inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto di dalam PDRB, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (material dan supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli; Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan;
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id),
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD,
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan,
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang,
- Data komoditas perkebunan,
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih,
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih,
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan ternak dari Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.

2 Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflasi perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan inventori:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- d. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.
- e. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

2.6.4 Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1 Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2 Metode Penghitungan

Ekspor impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (FOB) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

BAB 3

TINJAUAN

PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

2020
PDRB ADHB
205.081,99
PDRB ADHK
148.354,25

2021
PDRB ADHB
232.294,15
PDRB ADHK
153.850,63

2022
PDRB ADHB
276.936,85
PDRB ADHK
161.731,95

2023*
PDRB ADHB
293.780,01
PDRB ADHK
169.277,62

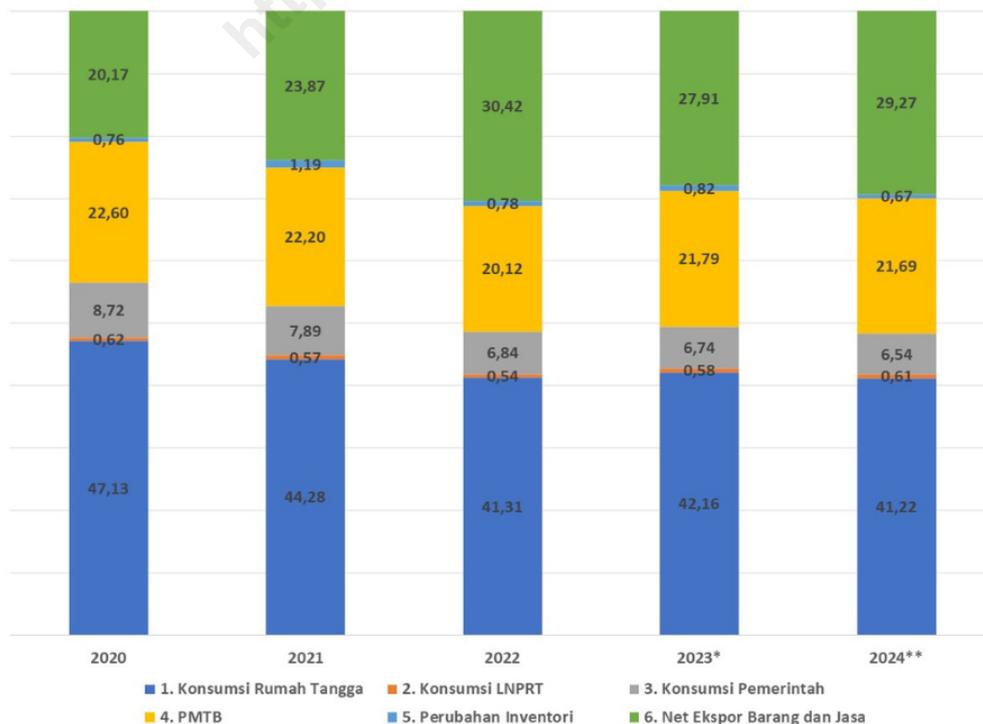
2024**
PDRB ADHB
322.975,53
PDRB ADHK
176.906,50

PDRB ADHK dan ADHB
dalam Miliar Rupiah

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi (persen), 2020-2024



BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jambi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020 sampai dengan 2024, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, pandemi *Covid-19* (tahun 2020–2021), struktur perdagangan global, dan kondisi politik (persiapan penyelenggaraan pemilu 2024).

Secara internal maka dapat diamati bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Jambi digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan secara deskriptif pada Bab 3 dan Bab 4.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAMBI MENURUT PENGELUARAN

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
2. Konsumsi LNPRT	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
3. Konsumsi Pemerintah	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
4. PMTB	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
5. Perubahan Inventori	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23	2.169,38
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	41.369,58	55.453,46	84.235,88	81.989,78	94.537,92
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	26.637,81	38.844,96	45.098,99	35.432,95	39.217,01
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.366,32	640,87	911,17	1.618,96	1.265,94
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	16.098,10	17.249,38	40.048,05	48.175,79	56.586,85
Total PDRB	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2024 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (2010=100) yang cenderung meningkat.

Pada tahun 2020 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi perekonomian nasional dan berimbas pada perekonomian Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi kembali pulih sejak pertengahan 2021, ditandai dengan kenaikan nilai ekspor barang dan jasa luar negeri dari 26,64 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 38,84 triliun rupiah pada tahun 2021. Pasca pandemi *Covid-19*, kondisi ekspor Provinsi Jambi semakin membaik hingga mencapai 45,10 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ekspor barang dan jasa luar negeri kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 35,43 triliun rupiah akan tetapi kondisi ini juga diimbangi dengan kenaikan net ekspor barang dan jasa antardaerah sebesar 48,18 triliun rupiah. Ekspor barang dan jasa luar negeri kembali meningkat pada tahun 2024 yang mencapai 56,59 triliun rupiah.

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41	76.374,49
2. Konsumsi LNPR	838,90	855,19	906,94	1.000,47	1.124,71
3. Konsumsi Pemerintah	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35	11.855,71
4. PMTB	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
5. Perubahan Inventori	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85	1.069,83
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	38.531,52	37.896,93	42.110,72	42.847,17	44.124,20
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	28.168,66	34.748,49	32.522,37	26.853,10	23.647,58
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	959,51	440,15	527,17	932,07	715,32
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	11.322,37	3.588,59	10.115,52	16.926,13	21.191,94
Total PDRB	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50

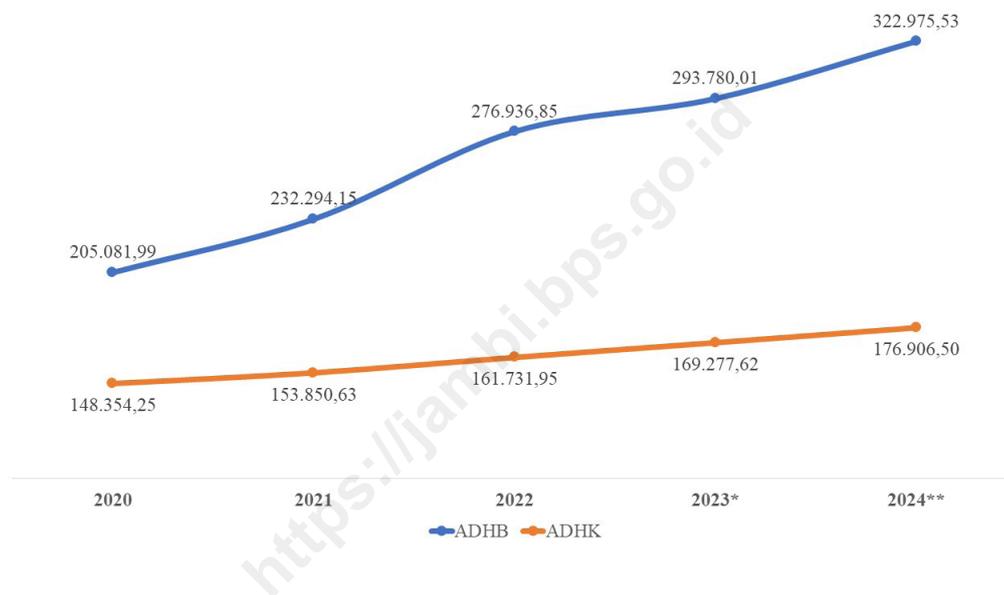
Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari 148,35 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 153,85 triliun rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat berada di atas 160 triliun dengan nilai masing-masing 161,73 triliun rupiah pada tahun 2022; 169,27 triliun rupiah di tahun 2023; dan 176,91 triliun rupiah pada tahun 2024. Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jambi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas.

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2020–2024. Gambar 3.1 menunjukkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga konstan telah meniadakan pengaruh faktor harga. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020–2024, PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi perekonomian secara umum.



Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2020–2024

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
2. Konsumsi LNPRT	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61
3. Konsumsi Pemerintah	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
4. PMTB	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
5. Perubahan Inventori	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	20,17	23,87	30,42	27,91	29,27
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	12,99	16,72	16,28	12,06	12,14
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	0,67	0,28	0,33	0,55	0,39
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	7,85	7,43	14,46	16,40	17,52
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Komponen penyusun PDRB pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dalam publikasi ini, komponen ekspor dan impor disajikan menjadi ekspor barang dan jasa luar negeri, impor barang dan jasa luar negeri, dan net ekspor antardaerah.

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2020–2024, aktivitas permintaan akhir yang memberikan andil terbesar terhadap PDRB pengeluaran adalah komponen konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Besarnya andil komponen ini cukup membantu perekonomian Provinsi Jambi untuk bertahan pada era pandemi *Covid-19*, walaupun berkontraksi pada tahun 2020. Dari Tabel 3.3, terlihat adanya tren penurunan kontribusi konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 hingga 2022, diikuti oleh sedikit peningkatan pada tahun 2023 sebelum kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024.

Komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah net ekspor barang dan jasa yaitu sebesar 29,27 persen (komponen net ekspor barang dan jasa antardaerah berkontribusi sebesar 17,52 persen; komponen ekspor barang dan jasa luar negeri berkontribusi 12,14 persen; dan komponen impor sebagai faktor pengurang dalam PDRB berkontribusi 0,39 persen). PMTB sebagai komponen pengungkit investasi memberikan andil yang juga cukup besar yaitu 21,69 persen. Komponen PKP hanya memberikan andil berkisar pada angka enam hingga delapan persen. Sementara komponen PKLNPRT memberikan andil kurang dari satu persen.

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41
2. Konsumsi LNPR T	-0,75	1,94	6,05	10,31	12,42
3. Konsumsi Pemerintah	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54
4. PMTB	1,04	9,27	2,51	9,88	6,78
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-28,26	23,36	-6,41	-17,43	-11,94
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-5,52	-54,13	19,77	76,81	-23,25
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Total PDRB	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,12 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-0,51 persen). Kontraksi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Jambi tahun 2020 disebabkan banyak komponen penyusun PDRB pengeluaran yang terkena imbas pandemi *Covid-19*. Tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai dirasakan, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,70 persen. Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 mencapai 3,50 persen per tahun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menggenjot perekonomian setelah terpuruk oleh pandemi *Covid-19*. Perekonomian Provinsi Jambi terkontraksi hingga mencapai 0,51 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 perekonomian berhasil tumbuh impresif mencapai 5,12 persen. Kemudian, perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2023 dan 2024 kembali tumbuh akan tetapi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,67 persen dan 4,51 persen. Pada tahun 2024, pada umumnya seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali komponen ekspor barang dan jasa luar negeri dan impor barang dan jasa luar negeri. Komponen dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah komponen PKLNPR T yang tumbuh cukup signifikan sebesar 12,42 persen dan diikuti oleh komponen PMTB yang tumbuh sebesar 6,78 persen.

**Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi (persen), 2020–2024**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	148,71	153,05	162,94	169,32	174,31
2. Konsumsi LNPRT	151,97	155,55	164,36	169,99	174,27
3. Konsumsi Pemerintah	163,26	167,32	170,41	174,70	178,14
4. PMTB	143,84	146,41	154,32	161,35	165,40
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	94,57	111,79	138,67	131,95	165,84
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	142,40	145,60	172,84	173,70	176,98
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Total PDRB	138,24	150,99	171,23	173,55	182,57

Catatan : * Angka Sementara

 ** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pada tabel 3.5 disajikan indeks implisit komponen PDRB menurut pengeluaran. Indeks implisit PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Selama periode 2020–2024, indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 182,57. Pada tahun tersebut, indeks implisit tertinggi terjadi pada subkomponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 178,14 persen. Sedangkan komponen dengan indeks terendah adalah komponen pembentukan modal tetap bruto yaitu sebesar 165,40 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama pandemi *Covid-19*, masyarakat Provinsi Jambi cenderung untuk menahan konsumsinya. Setelah masa pemulihan tahun 2021–2022, kondisi perekonomian yang semakin membaik mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

**Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jambi, 2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi rumah tangga					
a. ADHB (miliar Rp)	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
b. ADHK (miliar Rp)	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41	76.374,49
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu Rp.)					
a. ADHB	27.314,32	28.680,17	31.485,66	33.663,49	35.746,74
b. ADHK 2010	18.366,97	18.739,15	19.323,48	19.882,05	20.507,16
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi rumah tangga	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41
c. Per kapita	0,34	2,03	3,12	2,89	3,14
Jumlah penduduk (000 orang)	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17	3.724,28

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB dari sisi pengeluaran. Sebagai indikator daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga mencerminkan bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat dari waktu ke waktu. Total konsumsi rumah tangga dalam harga berlaku (ADHB) mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 96,65 triliun rupiah, kemudian terus meningkat menjadi 102,86 triliun rupiah di 2021, 114,39 triliun rupiah di 2022, dan 133,13 triliun rupiah pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Dalam harga konstan (ADHK 2010), total konsumsi rumah tangga juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan tercatat sebesar 64,99 triliun rupiah, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 67,21 triliun rupiah di 2021, 70,21 triliun rupiah di 2022, dan 76,37 triliun rupiah pada 2024. Namun, meskipun nilai konsumsi meningkat, proporsi konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB mencapai 47,13 persen, namun terus menurun hingga 41,22 persen pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana sektor lain seperti investasi dan perdagangan mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam perekonomian.

Selain melihat total konsumsi rumah tangga, penting juga untuk menganalisis konsumsi rumah tangga dalam ukuran per kapita. Data menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi per kapita per tahun dalam harga berlaku (ADHB) meningkat dari 27,31 juta rupiah pada 2020 menjadi 35,75 juta rupiah pada 2024. Dalam harga konstan (ADHK 2010), konsumsi per kapita juga mengalami peningkatan dari 18,37 juta rupiah di 2020 menjadi 20,51 juta rupiah pada 2024. Peningkatan konsumsi per kapita menunjukkan adanya pertumbuhan dalam daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi per kapita, dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan masyarakat juga mengalami perbaikan, terutama jika peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan menunjukkan pola fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, total konsumsi rumah tangga mengalami sedikit kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,44 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* serta berbagai kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang diberlakukan saat itu. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, konsumsi rumah tangga kembali tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,41 persen pada 2021, 4,46 persen pada 2022, 4,19 persen pada 2023, dan 4,41 persen pada 2024.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami tren yang cukup stabil. Pada 2020, konsumsi per kapita hanya tumbuh 0,34 persen, meningkat menjadi 2,03 persen pada 2021, 3,12 persen pada 2022, 2,89 persen pada 2023, dan 3,14 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan cukup baik, pertumbuhan konsumsi individu masih berada dalam kisaran yang moderat.

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 3,54 juta jiwa pada 2020 menjadi 3,72 juta jiwa pada 2024. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada peningkatan total konsumsi rumah tangga, karena semakin banyaknya individu yang melakukan konsumsi akan mendorong peningkatan total pengeluaran rumah tangga secara agregat.

**Tabel 3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jambi (persen), 2020–2024**

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	45,42	45,65	46,32	46,32	46,96
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	3,16	3,01	2,98	2,87	2,86
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15,83	15,46	15,22	14,99	14,65
Kesehatan dan Pendidikan	13,27	12,97	12,03	11,74	11,56
Transportasi dan Komunikasi	19,91	20,49	20,91	21,51	21,35
Hotel dan Restoran	0,83	0,83	0,87	0,88	0,90
Lainnya	1,58	1,58	1,68	1,70	1,72
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat, seiring dengan kenaikan harga subkelompok ini yang lebih tinggi. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 45,42 persen (2020); 45,65 persen (2021); 46,32 persen (2022 dan 2023); dan 46,96 persen pada tahun 2024.

Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Pada tahun 2024, kelompok konsumsi non makanan yang memberikan andil terbesar pada pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah kelompok transportasi dan komunikasi yaitu sebesar 21,35 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kelompok kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing andil sebesar 14,65 persen dan 11,56 persen. Kelompok konsumsi yang memberikan andil terkecil adalah kelompok hotel dan restoran yaitu sebesar 0,90 persen.

**Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jambi (persen), 2020–2024**

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	0,93	1,99	3,95	3,23	3,96
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	-4,12	1,07	9,15	3,60	3,59
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,16	2,81	4,94	4,33	4,63
Kesehatan dan Pendidikan	5,29	3,06	2,47	4,59	4,51
Transportasi dan Komunikasi	-6,30	7,24	5,14	5,47	5,04
Hotel dan Restoran	-6,00	5,20	10,20	7,77	7,85
Lainnya	-1,96	2,10	8,11	5,86	4,13
Total Konsumsi	-0,44	3,41	4,46	4,19	4,41

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan rincian masing-masing sebesar -0,44 persen (2020); 3,41 persen (2021); 4,46 persen (2022); 4,19 persen (2023); dan 4,41 persen (2024). Pertumbuhan “riil” menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Laju pertumbuhan riil tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada kelompok konsumsi restoran dan hotel (7,85 persen). Kemudian disusul oleh kelompok transportasi dan komunikasi dengan laju 5,04 persen dan kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga (5,47 persen). Sejak tahun 2021, perekonomian Provinsi Jambi kembali menggeliat meskipun sedikit melambat pada tahun 2023. Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang berlaku mulai 30 Desember 2022 mendorong pertumbuhan yang cukup signifikan pada kelompok konsumsi yang menunjang mobilitas masyarakat.

**Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jambi (persen), 2020–2024**

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1,18	4,86	8,57	4,87	4,84
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	0,84	0,53	0,81	0,52	3,43
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	-0,70	1,08	4,32	2,21	0,42
Kesehatan dan Pendidikan	0,04	0,93	0,61	1,05	1,24
Transportasi dan Komunikasi	0,27	2,16	7,94	5,60	1,58
Hotel dan Restoran	5,13	1,41	4,79	1,76	2,31
Lainnya	3,82	4,57	9,19	3,58	4,39

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan perubahan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman, selain restoran sebesar 1,18 persen (2020); 4,86 persen (2021); 8,57 persen (2022); 4,87 persen (2023); dan 4,84 persen (2024).

Sementara itu, pertumbuhan implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya sebesar 0,84 persen (2020). Pada tahun berikutnya implisit kelompok konsumsi ini melambat sebesar 0,53 persen (2021). Pertumbuhan implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya pada tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,81 persen dan kembali melambat pada tahun 2023 sebesar 0,52 persen. Sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan implisit mencapai 3,43 persen.

Pada tahun 2024, harga kelompok transportasi dan komunikasi mengalami inflasi hingga 1,58 persen. Sedangkan kelompok lainnya; kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kelompok hotel dan restoran; dan kelompok kesehatan dan pendidikan mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,39 persen; 0,42 persen; 2,31 persen; dan 1,24 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa peranan konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB masih relatif kecil.

**Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Jambi, 2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar Rp)	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	838,90	855,19	906,94	1.000,47	1.124,71
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit pada masing-masing tahun sebesar 0,62 persen (2020); 0,57 persen (2021); 0,54 persen (2022); 0,58 persen (2023); dan 0,61 persen (2024).

Proporsi konsumsi lembaga non profit pada tahun 2020 didorong oleh adanya pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, proporsi komponen LNPRT sedikit menurun dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,58 persen dan 0,61 persen. Selain itu, aktivitas LNPRT juga mengalami peningkatan yang cukup tajam yang didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan pada periode 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024. Pemilu 2024 adalah pemilihan serentak presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Biaya rapat koordinasi dan kampanye (pemasangan spanduk, baliho, dan sosialisasi) mendorong pengeluaran lembaga non profit meningkat.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Total konsumsi akhir mencakup konsumsi akhir pemerintah, rumah tangga, dan LNPRT. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Jambi serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi pemerintah					
a. ADHB (miliar Rp.)	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35	11.855,71
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
Konsumsi pemerintah per kapita (ribu Rp.)					
a. ADHB	5.052,61	5.111,66	5.216,63	5.385,18	5.670,67
b. ADHK 2010	3.094,78	3.055,00	3.061,17	3.082,58	3.183,35
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54
b. Konsumsi per kapita	-4,50	-1,29	0,20	0,70	3,27
Jumlah penduduk (ribu orang)	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17	3.724,28

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 17,88 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2021 pengeluaran konsumsi komponen ini meningkat menjadi 18,33 triliun rupiah. Konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan mencapai 21,12 triliun rupiah di tahun 2024.

Demikian halnya dengan pengeluaran pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat belanja pemerintah untuk penanganan pandemi *Covid-19*, tetapi proporsinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah secara total. Pada tahun 2021, pengeluaran pemerintah sebesar 10,96 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 11,12 triliun rupiah (2022); 11,34 triliun rupiah (2023); dan 11,86 triliun rupiah (2024).

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berkisar pada angka 6,54 persen hingga 8,72 persen. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 5,05 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat Tabel 3.11).

Selama periode 2020–2024 konsumsi pemerintah per kapita ADHK berfluktuasi. Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK selama lima tahun terakhir mencapai 3,10 juta rupiah. Indikasi perlambatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas mulai terlihat pada tahun 2020. Hal itu juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang berkontraksi hingga 4,50 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan konsumsi per kapita masih berkontraksi sebesar 1,29 persen dan kembali tumbuh positif di tahun 2022 hingga 2024 masing-masing sebesar 0,20 persen; 0,70 persen; dan 3,27 persen.

Selain laju pertumbuhan konsumsi per kapita, parameter laju total konsumsi pemerintah juga dapat digunakan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Secara struktur, pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan atas dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran pemerintah kolektif dan pengeluaran pemerintah individu.

Sebagian besar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Lebih dari 55 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Pengeluaran konsumsi kolektif mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2021, dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023, namun kembali turun pada tahun 2024. Proporsi pengeluaran pemerintah kolektif pada tahun 2020 sebesar 59,65 persen dan sedikit menurun pada tahun 2021 masing-masing menjadi 55,85 persen. Pada tahun 2022, struktur konsumsi ini kembali seperti sebelum pandemi *Covid-19* dengan proporsi sebesar 60,84 persen dan mencapai 61,92 persen di tahun 2023. Namun pada tahun 2024 proporsi konsumsi akhir pemerintah kembali turun menjadi 59,67 persen.

Tabel 3.12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
Konsumsi Kolektif	59,65	55,85	60,84	61,92	59,67
Konsumsi Individu	40,35	44,15	39,16	38,08	40,33
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK 2010)					
a. Konsumsi Kolektif	-5,86	-7,16	9,72	3,78	1,58
b. Konsumsi Individu	-4,28	11,10	-9,00	-0,82	9,31
Total Konsumsi	-5,24	0,05	1,51	1,97	4,54
Pertumbuhan indeks harga implisit					
a. Konsumsi Kolektif	2,22	3,41	2,65	2,51	1,12
b. Konsumsi Individu	5,20	0,99	0,77	2,50	3,28
Total Konsumsi	3,40	2,49	1,85	2,51	1,97

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Proporsi konsumsi individu pada tahun 2020 sebesar 40,35 persen dan mengalami peningkatan menjadi 44,15 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, proporsinya turun menjadi 39,16 persen dan kembali turun menjadi 38,08 persen pada 2024. Proporsi konsumsi individu kembali meningkat pada tahun 2024 proporsinya menjadi 40,33 persen. Kenaikan proporsi konsumsi individu pada tahun 2020-2021 terutama disebabkan pengeluaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain perubahan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan perubahan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020–2024 berfluktuasi. Laju pertumbuhan PMTB tahun 2020 sebesar 1,04 persen, kemudian meningkat menjadi 9,27 persen pada tahun 2021 (satu-satunya komponen yang bisa tumbuh tinggi di tengah pandemi *Covid-19*). Pada tahun 2022 pertumbuhan komponen ini kembali melambat sebesar 2,51 persen. Komponen PMTB tumbuh sangat signifikan mencapai 9,88 persen pada tahun 2023 dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi bagi komponen PMTB selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 pertumbuhan komponen ini sedikit melambat sebesar 6,78 persen.

Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar Rp)	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
Struktur PMTB (%)					
Bangunan	72,61	74,10	72,47	70,57	71,26
Non Bangunan	27,39	25,90	27,53	29,43	28,74
Total PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
Bangunan	0,70	9,47	(0,75)	8,30	9,71
Non Bangunan	1,96	8,76	11,19	13,63	0,15
Total PMTB	1,04	9,27	2,51	9,88	6,78

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing subkomponen sangat bervariasi. Subkomponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dimana selama lima tahun terakhir subkomponen ini memberikan andil di atas 70 persen terhadap total PMTB. Jika dilihat dari pertumbuhannya, subkomponen bangunan sangat berfluktuatif sedangkan subkomponen nonbangunan cenderung meningkat.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2020–2024 (Tabel 3.13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing subkomponen PMTB. Pertumbuhan “riil” subkomponen bangunan pada tahun 2020 sebesar 0,70 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan subkomponen ini tumbuh signifikan dengan pertumbuhan sebesar 9,47 persen. Subkomponen ini mengalami kontraksi sebesar 0,75 persen pada tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, subkomponen ini kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 8,30 persen. Dan pada tahun 2024 pertumbuhan subkomponen PMTB bangunan sebesar 9,71 persen yang menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pertumbuhan subkomponen non bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan komponen ini sebesar 1,96 persen dan pada tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 8,76 persen. Berbeda dengan sub komponen bangunan, komponen non bangunan pada tahun 2022 justru kembali mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 11,19 persen. Pada tahun 2023, subkomponen ini kembali menggeliat dengan pertumbuhan sebesar 13,63 persen dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan subkomponen ini melambat sebesar 0,15 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan posisi persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan posisi persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini mengindikasikan perekonomian pada tahun tersebut berjalan kurang bagus. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar Rp)	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23	2.169,38
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85	1.069,83
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji secara rinci. Komponen ini dalam PDRB nilainya berfluktuasi. Penambahan inventori terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,55 triliun rupiah dan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu 2,76 triliun rupiah.

Jika dilihat dari proporsinya, komponen inventori memberikan andil yang relatif kecil terhadap PDRB pengeluaran Provinsi Jambi. Selama periode 2020–2024, proporsi komponen ini masih di bawah dua persen. Pada tahun 2020, proporsinya sebesar 0,76 persen dan sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 1,19 persen. Pada tahun 2022-2024, proporsi komponen ini turun menjadi 0,78 persen, proporsi pada tahun 2023 hanya sebesar 0,82 persen, dan proporsi pada tahun 2024 sebesar 0,67 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR LUAR NEGERI PROVINSI JAMBI

Perkembangan ekspor Provinsi Jambi berkaitan erat dengan kondisi pasar internasional, karena proses ekspor merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari perdagangan luar negeri. Provinsi Jambi berperan aktif di dalam penjualan komoditi andalan regional berupa hasil tambang dan perkebunan. Ekspor bukan hanya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, namun aktivitas perdagangan ini diharapkan juga memberikan rangsangan untuk menumbuhkan permintaan dalam negeri sehingga industri akan terus meningkatkan output.

Tabel 3.15 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri					
a. ADHB (miliar p.)	26.637,81	38.844,96	45.098,99	35.432,95	39.217,01
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	28.168,66	34.748,49	32.522,37	26.853,10	23.647,58
c. Laju Pertumbuhan (persen)	-28,26	23,36	-6,41	-17,43	-11,94
d. Indeks Implisit Ekspor	94,57	111,79	138,67	131,95	165,84
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	12,99	16,72	16,28	12,06	12,14

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Komponen ekspor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2021 angka ekspor barang dan jasa luar negeri atas dasar harga berlaku meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 38,84 triliun rupiah dimana pada tahun sebelumnya nilai ekspor barang dan jasa luar negeri sebesar 26,64 triliun rupiah. Peningkatan nilai komponen ini yang sangat signifikan disebabkan oleh peningkatan permintaan komoditas ekspor terutama negara tujuan utama ekspor Provinsi Jambi (Cina, India, dan Singapura). Bahkan pada tahun 2022 nilainya mencapai 45,10 triliun rupiah yang merupakan nilai ekspor tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, nilai ekspor barang dan jasa luar negeri kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 35,43 triliun rupiah. Nilai ekspor barang dan jasa luar negeri kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 39,22 triliun rupiah.

Pertumbuhan riil ekspor ke luar negeri atas dasar harga konstan 2010 selama 2020–2024 pada umumnya mengalami kontraksi kecuali di tahun 2021. Pada tahun 2020, pertumbuhan minus terjadi sangat dalam (-28,26 persen) yang didorong oleh peraturan yang membatasi beberapa komoditas ekspor yang dilakukan oleh kementerian perdagangan demi mengurangi penyebaran *Covid-19* dan penurunan permintaan luar negeri. Pada tahun 2021, ketika pemulihan ekonomi dilakukan maka kinerja ekspor juga semakin membaik dan kembali tumbuh positif bahkan pertumbuhannya mencapai 23,36 persen.

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi selama 2022–2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2022, ekspor luar negeri Provinsi Jambi berkontraksi sebesar 6,41 persen. Meskipun nilai komponen ini atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, akan tetapi atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan harga pada komoditas ekspor luar negeri, akan tetapi secara volume terjadi penurunan. Pada tahun 2023, kinerja ekspor Provinsi Jambi kembali menurun dengan pertumbuhan berkontraksi sebesar 17,43 persen. Menurunnya kinerja ekspor di tahun 2023 dikarenakan menurunnya ekspor CPO yang merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, kinerja ekspor Provinsi Jambi kembali menurun dengan pertumbuhan berkontraksi sebesar 11,94 persen.

Jika dilihat perkembangan dari indeks implisit, maka indeks implisit ekspor terendah pada tahun 2020 mencapai 94,57 dan tertinggi tahun 2024 mencapai hingga 165,84. Indeks implisit tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 111,79; 138,67; dan 131,95.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR LUAR NEGERI PROVINSI JAMBI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun investasi (PMTB dan perubahan inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jambi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Tabel 3.16 menunjukkan perkembangan impor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi dalam lima tahun terakhir. Nilai impor dalam harga berlaku mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai impor tercatat sebesar 1,37 triliun rupiah, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 0,64 triliun rupiah. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 0,91 triliun rupiah, dan pada tahun 2023 melonjak signifikan menjadi 1,62 triliun rupiah sebelum kembali menurun menjadi 1,27 triliun rupiah pada tahun 2024.

Tabel 3.16 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor Barang dan Jasa Luar Negeri					
a. ADHB (miliar Rp.)	1.366,32	640,87	911,17	1.618,96	1.265,94
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	16.098,10	17.249,38	40.048,05	48.175,79	56.586,85
c. Laju Pertumbuhan (persen)	-5,52	-54,13	19,77	76,81	-23,25
d. Indeks Implisit Impor	142,40	145,60	172,84	173,70	176,98
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,67	0,28	0,33	0,55	0,39

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dalam harga konstan (ADHK 2010), pola serupa juga terjadi. Pada tahun 2020, nilai impor mencapai 0,96 triliun rupiah, lalu turun tajam pada tahun 2021 menjadi 0,44 triliun rupiah. Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,53 triliun rupiah, kemudian melonjak pada 2023 menjadi 0,93 triliun rupiah, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 0,72 triliun rupiah. Dari sisi laju pertumbuhan, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021, yaitu -54,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, pertumbuhan berbalik positif sebesar 19,77 persen dan melonjak drastis pada tahun 2023 menjadi 76,81 persen. Sayangnya, pada tahun 2024, impor kembali diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar -23,25 persen.

Indeks implisit impor menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 142,40 dan naik menjadi 145,60 pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 172,84 dan 173,70. Pada tahun 2024, indeks ini diproyeksikan meningkat lagi menjadi 176,98. Proporsi impor terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, tren impor menunjukkan pola naik-turun dengan kenaikan signifikan pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2024.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTARDAERAH PROVINSI JAMBI

Perdagangan ekspor impor tidak hanya yang dilakukan dari dan ke luar negeri saja, tetapi juga yang dilakukan dari dan ke luar provinsi, serta yang dilakukan oleh nonresiden yang berasal dari provinsi lain. Indikator yang digunakan adalah ekspor impor antardaerah. Sama halnya dengan yang dilakukan dengan komponen impor luar negeri, maka impor yang dilakukan dari provinsi lain juga diperlakukan sebagai faktor koreksi (pengurang).

Penguatan kinerja perdagangan Provinsi Jambi salah satunya dapat dilihat dari aktivitas ekspor neto barang dan jasa antardaerah. Selama lima tahun terakhir, ekspor neto barang dan jasa cenderung meningkat. Nilai ekspor neto barang dan jasa atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 16,10 triliun rupiah dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 48,18 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, nilai ekspor neto barang dan jasa atas dasar harga konstan menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, ekspor neto atas dasar harga konstan tercatat sebesar 11,32 triliun rupiah, mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 3,59 triliun rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, nilai ekspor neto kembali meningkat masing-masing menjadi 10,12 triliun rupiah dan 16,93 triliun rupiah.

Tabel 3.17 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah					
a. ADHB (miliar Rp.)	16.098,10	17.249,38	40.048,05	48.175,79	56.586,85
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	11.322,37	3.588,59	10.115,52	16.926,13	21.191,94
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,85	7,43	14,46	16,40	17,52

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, ekspor neto barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi ekspor neto terhadap PDRB tercatat sebesar 7,85 persen, kemudian menurun menjadi 7,43 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya meningkat, mencapai 16,40 persen pada tahun 2023.

BAB 4

PERKEMBANGAN PDRB



INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR berfluktuasi dengan rentang -42,58 sampai dengan 6,41. Tahun 2020 angka ICOR pada posisi -42,58 menjadi 5,55 pada 2024.

Rasio Ekspor terhadap Impor

Rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2020-2024. Pada 2020 besar rasio ini 1,44, sedangkan pada 2024 sebesar 1,79



Total Konsumsi Akhir dan PDRB

Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2024 proporsi antar keduanya sebesar 48,37



BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana didalamnya masih terkandung nilai penyusutan. Nilai PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (miliar Rp)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
PDRB Perkapita					
a. ADHB (ribu Rp)	57.957,73	64.770,93	76.224,16	79.849,56	86.721,51
b. ADHK 2010 (ribu Rp)	41.926,04	42.898,41	44.515,14	46.009,74	47.500,81
Pertumbuhan (%)					
PDRB Perkapita ADHK 2010	0,27	2,32	3,77	3,36	3,24
Jumlah Penduduk (ribu orang)	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17	3.724,28

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Selama periode 2020-2024, PDRB per kapita Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, setiap penduduk Jambi rata-rata mampu menciptakan nilai tambah lebih besar di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHK 2010 tercatat sebesar 41,93 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 42,90 juta rupiah pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan nilai 44,52 juta rupiah, tahun 2023 sebesar 46,01 juta rupiah, dan tahun 2024, sebesar 47,50 juta rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020, hanya sebesar 0,27 persen. Namun, memasuki tahun 2021, terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 2,32 persen. Tahun 2022 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 3,77 persen, yang kemudian sedikit melambat menjadi 3,36 persen pada 2023 dan 3,24 persen pada 2024. Meskipun laju pertumbuhan mengalami sedikit fluktuasi, secara keseluruhan ekonomi Jambi menunjukkan pemulihan yang stabil setelah pandemi *Covid-19*.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (miliar Rp)	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
Total Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	0,71	0,67	0,61	0,66	0,62

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik terhadap ekspor dengan produk yang diekspor, baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jambi (*share* tahun 2024 sebesar 41,22 persen), yang artinya bahwa seluruh nilai tambah yang dihasilkan di wilayah Jambi sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, total konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku (ADHB) di Provinsi Jambi terus meningkat dari 96,65 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 133,13 triliun rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, total ekspor juga mengalami pertumbuhan dari 135,82 triliun rupiah pada 2020 menjadi 214,63 triliun rupiah pada 2024. Perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan bahwa pada 2020, rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor mencapai 0,71. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 0,67 pada 2021, 0,61 pada 2022, dan 0,62 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor lebih cepat dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Peningkatan dan penurunan ekspor dipengaruhi oleh perubahan volume dan harga produk yang diekspor. Sementara itu, kenaikan dan penurunan konsumsi rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh faktor inflasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(miliar Rp)	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,09	1,99	2,05	1,94	1,90

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara konsumsi akhir rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di wilayah Jambi. Selama periode 2020–2024, rasio ini menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB tercatat sebesar 2,09, lalu menurun menjadi 1,99 pada tahun 2021. Tahun 2022, rasio kembali meningkat sedikit ke angka 2,05, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 1,94 dan 1,90.

Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi (PMTB) lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat menunjukkan adanya pergeseran penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan untuk investasi dibandingkan konsumsi langsung oleh rumah tangga.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Dalam hal ini, komponen yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif besar. Dalam periode 2020–2024, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, proporsinya mencapai 56,47 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 52,74 persen pada 2021 dan terus menurun hingga 48,69 persen pada 2022. Namun, pada 2023, proporsinya kembali meningkat menjadi 49,48 persen sebelum kembali turun sedikit menjadi 48,37 persen pada 2024.

Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68	133.131,00
b. LNPRRT	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72	1.959,98
c. Pemerintah	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99	21.119,17
Jumlah	115.804,47	122.521,08	134.837,00	145.367,39	156.210,15
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
Proporsi	56,47	52,74	48,69	49,48	48,37

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan modal (PMTB). Di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB).

Pada tahun 2020–2024 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (Tabel 4.5). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) diperlukan sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 cenderung naik. Sedangkan pada tahun 2023, rasio tersebut kembali mengalami penurunan. Penurunan rasio tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.002,61	70.058,09
Rasio Ekspor terhadap PMTB	2,93	2,99	3,38	2,92	3,06

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Rasio ekspor terhadap PMTB dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 cenderung meningkat, dari 2,93 pada tahun 2020 menjadi 3,38 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 rasio ini mengalami penurunan menjadi 2,92, yang mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor tidak sebanding dengan kenaikan PMTB. Pada tahun 2024, rasio kembali meningkat menjadi 3,06, menunjukkan adanya pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan 2022.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
Total Impor (ADHB) (miliar Rp)	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
Rasio PDRB terhadap Impor	2,17	2,35	2,66	2,80	2,69

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Rasio PDRB terhadap impor menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, rasio PDRB terhadap impor sebesar 2,17 dan meningkat menjadi 2,35 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio tersebut kembali meningkat menjadi 2,66 dan mencapai angka tertinggi di tahun 2023 sebesar 2,80. Peningkatan rasio ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Namun, pada tahun 2024, rasio PDRB terhadap impor sedikit menurun menjadi 2,69, yang menunjukkan bahwa peningkatan impor lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi,
2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	205.081,99	232.294,15	276.936,85	293.780,01	322.975,53
Persentase (%)	68,47	70,18	72,68	73,68	72,90
Total Nilai Impor ADHB (miliar Rp)					
Total Nilai Impor ADHB (miliar Rp)	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
Persentase (%)	31,53	29,82	27,32	26,32	27,10
Total Permintaan Akhir (miliar Rp)					
Total Permintaan Akhir (miliar Rp)	299.529,17	330.998,82	381.038,83	398.702,23	443.062,70
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Provinsi Jambi, dengan rentang nilai 26,32–31,53 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 68–73 persen dari produksi domestik. Tendensi permintaan akhir masyarakat pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 299,53 triliun rupiah (2020) menjadi 330,99 triliun rupiah (2021). Pada tahun 2021, permintaan akhir meningkat dan terus bertumbuh hingga mencapai angka tertinggi sebesar 443,06 triliun rupiah pada tahun 2024.

Di sisi lain, penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 205,08 triliun rupiah (2020); 232,29 triliun rupiah (2021); 276,94 triliun rupiah (2022); 293,78 triliun rupiah (2023); dan 322,98 triliun rupiah (2024). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 94,45 triliun rupiah (2020); 98,70 triliun rupiah (2021); 104,10 triliun rupiah (2022); 104,92 triliun rupiah (2023); dan 120,09 triliun rupiah (2024).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi ekspor dan impor yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar (*non residen*) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	135.816,76	154.158,13	188.337,86	186.911,99	214.625,09
Nilai Impor (ADHB) (miliar Rp)	94.447,18	98.704,67	104.101,98	104.922,21	120.087,18
Net Ekspor (X-M) (miliar Rp)	41.369,58	55.453,46	84.235,88	81.989,78	94.537,92
Rasio Ekspor terhadap Impor	1,44	1,56	1,81	1,78	1,79

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Selama periode 2020–2024, perdagangan Provinsi Jambi dengan wilayah luar negeri maupun antar provinsi menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi berada dalam posisi surplus.

Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk. Surplus perdagangan Provinsi Jambi yang terjadi kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan 2024 tercatat masing-masing sebesar 41,37 triliun rupiah (2020); 55,45 triliun rupiah (2021); 84,02 triliun rupiah (2022); 81,48 triliun rupiah (2023); dan 94,54 triliun rupiah (2024).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, rasionya sebesar 1,44 meningkat menjadi 1,56 pada tahun 2021 dan kembali menguat menjadi 1,81 pada tahun 2022 yang merupakan level tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio ekspor terhadap impor kembali melemah menjadi 1,78. Namun, kembali sedikit menguat pada tahun 2024 sebesar 1,79.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Indikator ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

I_t = PMTB tahun ke-t

Y_t = Output tahun ke-t

Y_{t-1} = Output tahun ke-t-1

Tabel 4.9 Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
Perubahan PDRB ADHK (miliar Rp)	-756,83	5.496,37	7.881,32	7.545,68	7.628,87
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
ICOR	-42,58	6,41	4,58	5,26	5,55

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengalami fluktuasi dalam rentang -42,58 hingga 5,55 selama periode 2020–2024. Pada tahun 2019, sebelum pandemi *Covid-19*, investasi dalam kondisi kondusif dengan ICOR sebesar 5,14. Namun, ketika pandemi melanda pada tahun 2020, angka ICOR anjlok menjadi -42,58, yang mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan output secara optimal. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan nilai ICOR meningkat menjadi 6,41, menunjukkan adanya pemulihan investasi yang lebih efektif. Pada tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ICOR tetap berada di angka 4,58, yang masih mencerminkan efisiensi investasi yang cukup baik. Pada tahun 2023, nilai ICOR kembali mengalami kenaikan menjadi 5,26, seiring dengan peningkatan investasi yang lebih stabil. Proyeksi tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan lebih lanjut dengan ICOR mencapai 5,55, yang mencerminkan efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB 5

KESIMPULAN

<https://mbmbrs.go.id>

BAB 5 KESIMPULAN

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan kegiatan ekspor impor. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran antara lain distribusi, laju pertumbuhan dan indeks implisit.
3. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,51persen. Pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan pada tahun 2021, membawa sedikit perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 3,70 persen. Pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Jambi berhasil tumbuh impresif sebesar 5,12 persen namun sedikit melambat di tahun 2023 sebesar 4,67 persen dan berlanjut pada tahun 2024 yang hanya tumbuh 4,51 persen.
4. Pada tahun 2024, komponen PKRT mendominasi distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran sebesar 41,22 persen.
5. Komponen PKLNPRT pada tahun 2024 mencapai pertumbuhan tertinggi dengan laju sebesar 12,42 persen. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik pada masa kampanye Pemilu 2024 (pemilihan serentak presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif) yang dilaksanakan pada periode 28 November 2023-10 Februari 2024 dan berlanjut pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Biaya kampanye meliputi pemasangan spanduk, baliho, dan sosialisasi mendorong pengeluaran lembaga non profit meningkat.

6. Selama periode 2020–2024, net ekspor Provinsi Jambi (luar negeri dan antar provinsi) bernilai positif yang menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi selalu berada dalam posisi surplus.

<https://jambi.bps.go.id>

<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran*. Jakarta: Badan Pusat Statistik: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2024). *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2024). *Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2018-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2024). *Pendapatan Nasional Indonesia 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2025). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation and Development, United Nations, and World Bank. (2009). System of National Accounts 2008, New York. (2023).*
- Frenken Jim. (1992). *How to Measure Tangible Capital Stocks*. Netherlands.
- United Nations. (1986). *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*. Series F No.39. New York.
- _____. (1988). *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*. Series F No.50. New York.
- _____. (1973). *Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods*. Series F No.14 Rev. New York.

LAMPIRAN

<https://jalma.bps.go.id>

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi (juta rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96.651.035,77	102.858.403,04	114.393.369,89	123.853.680,49	133.130.998,09
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	43.901.664,74	46.950.016,14	52.986.603,91	57.365.107,65	62.523.269,82
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	3.049.389,52	3.098.614,44	3.409.293,26	3.550.328,12	3.803.828,25
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15.300.975,68	15.901.228,71	17.406.160,81	18.561.110,37	19.502.652,27
d) Kesehatan dan Pendidikan	12.828.943,23	13.344.116,48	13.756.223,14	14.539.704,64	15.383.901,45
e) Transportasi dan Komunikasi	19.240.688,32	21.078.140,77	23.922.273,51	26.643.379,22	28.427.399,43
f) Restoran dan Hotel	804.415,02	858.119,67	990.929,01	1.086.719,29	1.199.183,75
g) Lainnya	1.524.959,24	1.628.166,81	1.921.886,25	2.107.331,20	2.290.763,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.274.912,26	1.330.253,17	1.490.604,80	1.700.720,96	1.959.975,65
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.878.520,93	18.332.423,33	18.953.025,13	19.812.986,34	21.119.173,03
a) Konsumsi Kolektif	10.665.295,99	10.239.292,70	11.531.772,51	12.268.495,75	12.601.900,36
b) Konsumsi Individu	7.213.224,94	8.093.130,63	7.421.252,63	7.544.490,59	8.517.272,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	46.354.758,82	51.559.906,12	55.711.024,69	64.002.614,15	70.058.088,68
a) Bangunan	33.658.193,86	38.203.759,48	40.371.179,23	45.167.582,52	49.922.761,78
b) Non-Bangunan	12.696.564,95	13.356.146,63	15.339.845,46	18.835.031,63	20.135.326,90
5. Perubahan Inventori	1.553.185,81	2.759.707,67	2.152.944,57	2.420.229,97	2.169.376,07
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	41.369.578,84	55.453.461,58	84.235.876,61	81.989.780,09	94.537.916,72
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	26.637.805,94	38.844.955,46	45.098.988,35	35.432.952,41	39.217.006,51
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.366.322,76	640.874,55	911.165,51	1.618.961,33	1.265.940,87
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	16.098.095,67	17.249.380,67	40.048.053,77	48.175.789,01	56.586.851,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	205.081.992,42	232.294.154,91	276.936.845,70	293.780.012,02	322.975.528,24

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)

Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (juta rupiah), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	64.991.049,83	67.206.008,33	70.205.869,03	73.149.408,70	76.374.492,04
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	27.923.200,61	28.478.061,66	29.602.473,74	30.559.479,82	31.769.093,21
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	2.321.055,50	2.345.991,94	2.560.587,44	2.652.672,42	2.747.820,01
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9.930.971,54	10.210.442,76	10.714.428,16	11.178.788,58	11.696.709,09
d) Kesehatan dan Pendidikan	8.993.402,12	9.268.587,96	9.497.288,93	9.933.667,39	10.381.522,93
e) Transportasi dan Komunikasi	14.260.416,63	15.292.479,66	16.079.020,11	16.958.891,23	17.812.943,10
f) Restoran dan Hotel	503.942,28	530.129,80	584.186,45	629.556,55	679.006,91
g) Lainnya	1.058.061,16	1.080.314,54	1.167.884,20	1.236.352,71	1.287.396,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	838.902,20	855.185,45	906.936,26	1.000.473,06	1.124.705,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.950.816,01	10.956.424,66	11.121.821,98	11.341.346,93	11.855.708,00
a) Konsumsi Kolektif	6.625.127,65	6.150.797,34	6.748.675,39	7.004.088,48	7.114.693,31
b) Konsumsi Individu	4.325.688,36	4.805.627,33	4.373.146,60	4.337.258,45	4.741.014,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32.226.990,00	35.215.517,75	36.100.051,29	39.667.373,94	42.357.561,97
a) Bangunan	23.379.782,14	25.593.265,87	25.401.063,57	27.510.266,60	30.182.389,49
b) Non-Bangunan	8.847.207,85	9.622.251,88	10.698.987,72	12.157.107,34	12.175.172,48
5. Perubahan Inventori	814.980,76	1.720.559,49	1.286.551,22	1.271.853,56	1.069.829,42
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	38.531.516,09	37.896.932,86	42.110.718,18	42.847.168,46	44.124.200,57
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	28.168.655,46	34.748.487,48	32.522.368,77	26.853.103,37	23.647.576,62
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	959.510,02	440.147,52	527.166,80	932.067,33	715.319,01
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	11.322.370,66	3.588.592,90	10.115.516,21	16.926.132,42	21.191.942,96
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	148.354.254,90	153.850.628,54	161.731.947,96	169.277.624,65	176.906.497,96

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47,13	44,28	41,31	42,16	41,22
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	21,41	20,21	19,13	19,53	19,36
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	1,49	1,33	1,23	1,21	1,18
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7,46	6,85	6,29	6,32	6,04
d) Kesehatan dan Pendidikan	6,26	5,74	4,97	4,95	4,76
e) Transportasi dan Komunikasi	9,38	9,07	8,64	9,07	8,80
f) Restoran dan Hotel	0,39	0,37	0,36	0,37	0,37
g) Lainnya	0,74	0,70	0,69	0,72	0,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,57	0,54	0,58	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,72	7,89	6,84	6,74	6,54
a) Konsumsi Kolektif	5,20	4,41	4,16	4,18	3,90
b) Konsumsi Individu	3,52	3,48	2,68	2,57	2,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,60	22,20	20,12	21,79	21,69
a) Bangunan	16,41	16,45	14,58	15,37	15,46
b) Non-Bangunan	6,19	5,75	5,54	6,41	6,23
5. Perubahan Inventori	0,76	1,19	0,78	0,82	0,67
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	20,17	23,87	30,42	27,91	29,27
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	12,99	16,72	16,28	12,06	12,14
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	0,67	0,28	0,33	0,55	0,39
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	7,85	7,43	14,46	16,40	17,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,68	3,41	4,46	4,19	4,41
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	5,04	1,99	3,95	3,23	3,96
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	-2,16	1,07	9,15	3,60	3,59
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	5,72	2,81	4,94	4,33	4,63
d) Kesehatan dan Pendidikan	12,60	3,06	2,47	4,59	4,51
e) Transportasi dan Komunikasi	-3,27	7,24	5,14	5,47	5,04
f) Restoran dan Hotel	-3,79	5,20	10,20	7,77	7,85
g) Lainnya	-2,27	2,10	8,11	5,86	4,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,80	1,94	6,05	10,31	12,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,94	0,05	1,51	1,97	4,54
a) Konsumsi Kolektif	2,15	-7,16	9,72	3,78	1,58
b) Konsumsi Individu	1,62	11,10	-9,00	-0,82	9,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,71	9,27	2,51	9,88	6,78
a) Bangunan	4,43	9,47	-0,75	8,30	9,71
b) Non-Bangunan	5,46	8,76	11,19	13,63	0,15
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-28,29	23,36	-6,41	-17,43	-11,94
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-10,25	-54,13	19,77	76,81	-23,25
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,82	3,70	5,12	4,67	4,51

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)

Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	148,71	153,05	162,94	169,32	174,31
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	157,22	164,86	178,99	187,72	196,81
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	131,38	132,08	133,14	133,84	138,43
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	154,07	155,73	162,46	166,04	166,74
d) Kesehatan dan Pendidikan	142,65	143,97	144,84	146,37	148,19
e) Transportasi dan Komunikasi	134,92	137,83	148,78	157,11	159,59
f) Restoran dan Hotel	159,62	161,87	169,63	172,62	176,61
g) Lainnya	144,13	150,71	164,56	170,45	177,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	151,97	155,55	164,36	169,99	174,27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	163,26	167,32	170,41	174,70	178,14
a) Konsumsi Kolektif	160,98	166,47	170,87	175,16	177,12
b) Konsumsi Individu	166,75	168,41	169,70	173,95	179,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	143,84	146,41	154,32	161,35	165,40
a) Bangunan	143,96	149,27	158,93	164,18	165,40
b) Non-Bangunan	143,51	138,80	143,38	154,93	165,38
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	94,57	111,79	138,67	131,95	165,84
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	142,40	145,60	172,84	173,70	176,98
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	138,24	150,99	171,23	173,55	182,57

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Lampiran 6 Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,36	2,92	6,46	3,91	2,95
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	5,87	4,86	8,57	4,87	4,84
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	4,74	0,53	0,81	0,52	3,43
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	0,78	1,08	4,32	2,21	0,42
d) Kesehatan dan Pendidikan	5,00	0,93	0,61	1,05	1,24
e) Transportasi dan Komunikasi	2,38	2,16	7,94	5,60	1,58
f) Restoran dan Hotel	8,35	1,41	4,79	1,76	2,31
g) Lainnya	6,92	4,57	9,19	3,58	4,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	6,13	2,35	5,66	3,43	2,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,36	2,49	1,85	2,51	1,97
a) Konsumsi Kolektif	1,63	3,41	2,65	2,51	1,12
b) Konsumsi Individu	6,01	0,99	0,77	2,50	3,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,47	1,79	5,40	4,55	2,51
a) Bangunan	3,26	3,69	6,47	3,30	0,74
b) Non-Bangunan	0,41	-3,28	3,29	8,06	6,74
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-16,20	18,21	24,05	-4,85	25,68
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-6,67	2,25	18,71	0,49	1,89
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-4,97	9,22	13,41	1,35	5,20

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi



**SENSUS
EKONOMI
2026**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura, Jambi 36122 Telp. 0741-60497
Homepage: <https://www.jambi.bps.go.id>
Email: bps1500@bps.go.id

ISSN 2301-4466



9 772301 446009